

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan, termasuk didalamnya akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan antar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2004). Sebuah negara dianggap maju apabila pembangunan di dalamnya terus mengalami peningkatan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Namun, kemiskinan masih menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang, Termasuk Indonesia. Kemiskinan sering dijadikan tolok ukur kesejahteraan masyarakat, di mana lebih dari 25 juta orang (9,36%) hidup di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023). Masalah ini memiliki dimensi yang kompleks, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, menjadikannya isu multidimensi (Todaro & Smith, 2020). Pengurangan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun signifikan dari 2018 hingga 2023, meski sempat naik pada 2020 akibat pandemi. Tren ini juga terlihat di Nusa Tenggara Barat (NTB); meskipun demikian, tingkat kemiskinan di NTB masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan belum merata di seluruh wilayah. Beberapa kabupaten di NTB menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi kesenjangan. Penyebab kemiskinan di wilayah ini beragam dan memiliki keterkaitan dengan dimensi gender, di mana peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi serta akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja turut memengaruhi tingkat kemiskinan.

Di samping itu, terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan, memperkuat ketimpangan ekonomi yang ada. Kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan, peningkatan ampilan, dan akses yang setara dalam dunia kerja dapat berperan penting dalam mengurangi

kemiskinan di NTB. Dengan pendekatan yang tepat, pengurangan kemiskinan di NTB dapat lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga mempersempit kesenjangan antara wilayah NTB dan standar nasional. Untuk lebih memahami perbandingan tingkat kemiskinan antara Indonesia dan Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2018 hingga 2023, berikut grafik yang menunjukkan tren tingkat kemiskinan di Indonesia dan NTB.



Sumber :BPS 2023

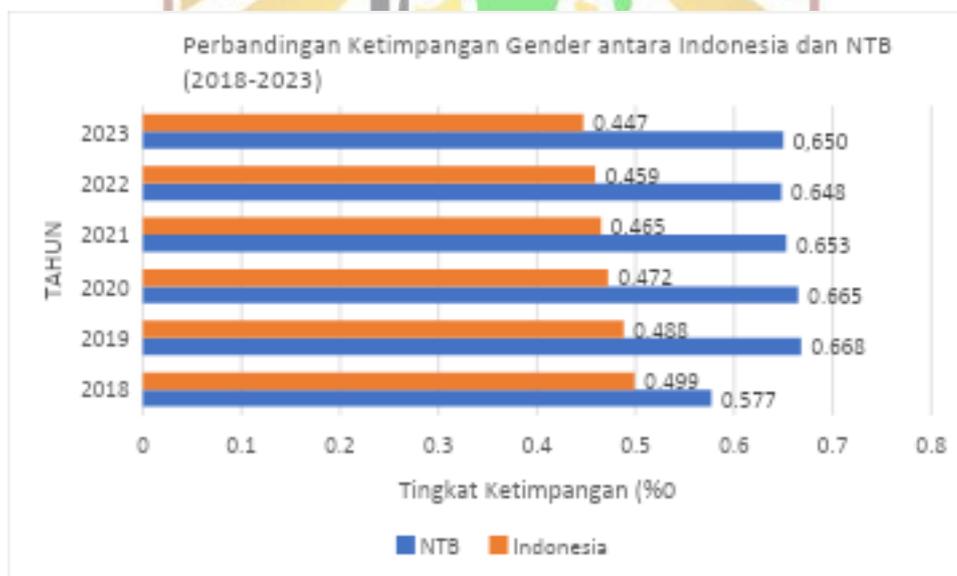
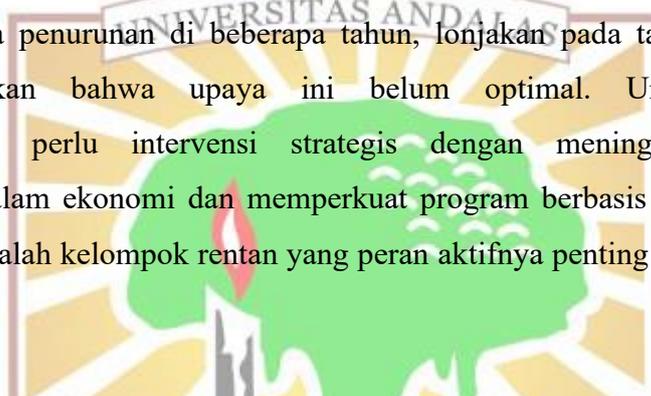
Gambar 1.1 2Perbandingan Kemiskinan di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2018-2023

Grafik tersebut menggambarkan persentase tingkat kemiskinan di Provinsi NTB dan rata-rata nasional dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan di NTB tercatat sebesar 14,75%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,82%. Di tahun 2019, tingkat kemiskinan di NTB sedikit meningkat menjadi 14,56%, sementara tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan menjadi 9,41%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa NTB masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan, berbeda dengan tren penurunan yang terjadi secara nasional.

Pada tahun 2020 hingga 2023, tingkat kemiskinan di NTB relatif fluktuatif, dengan angka 13,97% di tahun 2020, naik menjadi 14,14% di tahun 2021, lalu turun

menjadi 13,68% di tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 13,85% pada tahun 2023. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional juga menunjukkan fluktuasi tetapi tetap berada pada tingkat yang lebih rendah, yakni 9,78% pada tahun 2020, naik menjadi 10,14% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 9,36% pada tahun 2023. Ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di NTB membutuhkan perhatian lebih, mengingat perbedaan yang masih cukup besar dibandingkan rata-rata nasional.

Persentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tantangan dalam upaya pemerintah daerah untuk menemukannya. Meskipun ada penurunan di beberapa tahun, lonjakan pada tahun-tahun tertentu mengindikasikan bahwa upaya ini belum optimal. Untuk keberhasilan berkelanjutan, perlu intervensi strategis dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan memperkuat program berbasis gender, mengingat perempuan adalah kelompok rentan yang peran aktifnya penting dalam pengentasan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 1.2 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia dan NTB Tahun 2018-2023

Gambar menunjukkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 2018 hingga 2023 di Indonesia dan NTB. NTB memiliki IKG lebih tinggi daripada rata-rata nasional, meningkat dari 0,577 menjadi 0,650, sementara IKG nasional menurun dari 0,499 menjadi 0,447, menunjukkan ketimpangan gender di NTB meningkat meski terjadi kemajuan di tingkat nasional. Perbedaan ini mengindikasikan tantangan lebih besar bagi NTB dalam mencapai kesetaraan gender, terutama karena keterbatasan pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Upaya mengurangi ketimpangan gender terus dilakukan, meski kesenjangan masih cukup signifikan.

Meskipun ketimpangan gender secara umum menurun, fluktuasi menunjukkan tantangan dalam mencapai kesetaraan di NTB. Kenaikan ketimpangan pada 2019 dan 2023 menyoroti perlunya upaya intensif, terutama dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) yang membatasi akses perempuan ke ekonomi, pendidikan, dan karir. Peningkatan partisipasi perempuan dapat mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta membantu mengurangi ketimpangan gender (Kurniasari et al., 2024).

Pasar tenaga kerja terbentuk dari interaksi antara perusahaan, pekerja, dan pencari kerja yang menyelesaikan isu terkait upah dan kondisi kerja (Kiaušienė, 2015). Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup (Anwar, 2022). Hal ini juga memicu perubahan sosial, termasuk peran dan status sosial perempuan. Oleh karena itu, banyak pemerintah menjadikan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sebagai prioritas untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.



Sumber: BPS NTB (2023)

Gambar 1.3 2TPAK menurut jenis kelamin di provinsi di Nusa Tenggara Barat (%)

Grafik menunjukkan perbedaan signifikan antara tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja di NTB dari 2018 hingga 2023. Laki-laki memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi, dengan persentase 80,01% pada 2018 dibandingkan dengan 54,27% untuk perempuan. Kesenjangan ini berlanjut hingga 2024, di mana TPAK laki-laki mencapai 84,18% dan TPAK perempuan 62,54%. Meskipun partisipasi perempuan meningkat, perbedaan yang masih besar berdampak pada rendahnya Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP), menunjukkan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di sektor tenaga kerja.

Pendapatan berkontribusi terhadap kemiskinan dan mencerminkan standar hidup serta kesejahteraan. Di NTB, pendapatan perempuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perekonomian lokal. Data BPS NTB menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 43,6% perempuan terlibat dalam angkatan kerja, meningkat dari 39,1% pada 2019. Perempuan yang bekerja lebih aktif dalam pengambilan keputusan keuangan, yang dapat memperbaiki kondisi hidup dan pendidikan anak. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesenjangan upah, di mana perempuan hanya menerima 75% dari pendapatan laki-laki untuk pekerjaan setara,

serta akses terbatas terhadap pekerjaan layak dan pelatihan keterampilan, dengan sekitar 30% yang mendapatkan pelatihan memadai.

Kemudian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting untuk menilai kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, mempertimbangkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam angkatan kerja. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), IPG menunjukkan pergeseran positif, tercatat sebesar 91,38% pada tahun 2023, meningkat dari 91,08% pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan akses perempuan ke pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan partisipasi perempuan di perguruan tinggi yang melebihi 30% pada tahun 2023.

PDRB berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Data menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 6,95% pada 2022 setelah turun drastis menjadi 0,64% di 2020 akibat pandemi COVID-19. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kontribusi mereka terhadap PDRB masih menjadi tantangan. Pada tahun 2023, meskipun PDRB hanya tumbuh 1,80%, akses perempuan terhadap pekerjaan layak dan pengembangan keterampilan tetap penting untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam ekonomi daerah. Keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja berpotensi mendorong PDRB NTB lebih lanjut. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja NTB masih rendah, yang berdampak langsung pada kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2023, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja NTB berada di angka 43,6%, yang menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dibandingkan laki-laki yang mencapai 56,4%. Upaya untuk meningkatkan pendapatan perempuan melalui akses pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB. Dengan meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian, NTB dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga mengurangi kesenjangan gender dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Keterbatasan akses perempuan terhadap kepemilikan, pengambilan keputusan, serta pengaruh dari nilai-nilai budaya patriarki menjadi penghalang

utama bagi partisipasi ekonomi mereka. Utaminingsih, 2024). Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan sering berada dalam posisi yang lemah (Asriani & Osira, 2019). Sebuah studi di Riau mengungkapkan bahwa kontribusi perempuan dalam pembangunan masih sangat terbatas, terutama dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan (Kurniasih, Tampubolon, & Ula, 2022).

Beberapa faktor yang sudah dipaparkan di atas dapat menciptakan tantangan dan peluang yang berbeda dalam hal Peran perempuan di dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diperlukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Peran perempuan berpartisipasi aktif dalam perekonomian di NTB untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada. Dengan demikian, penulis ingin lebih lanjut mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh dari faktor tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP), kontribusi pendapatan perempuan (SPP), indeks pembangunan gender (IPG), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Hubungan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dalam jangka pendek dan jangka Panjang.
2. Bagaimana Hubungan Sumbangan pendapatan perempuan (SPP) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dalam jangka pendek dan jangka Panjang.
3. Bagaimana Hubungan indeks pembangunan gender (IPG) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Bagaimana Hubungan PDRB terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji Hubungan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat 2017 hingga 2023 dalam jangka pendek dan jangka panjang .
2. Mengkaji Hubungan Sumbangan pendapatan perempuan (SPP) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang .
3. Mengkaji Hubungan indeks pembangunan gender (IPG) terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat secara dalam jangka pendek dan jangka Panjang.
4. Mengkaji Hubungan PDRB terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Barat secara dalam jangka pendek dan jangka Panjang.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Untuk :

1. Manfaat Sebagai penulis
Melalui proses penelitian, penulis dapat mengasah keterampilan analisis, metodologi penelitian, dan penulisan ilmiah, yang berguna untuk pengembangan akademis dan profesional di masa depan.
2. Manfaat untuk akademis
Penelitian ini dapat memicu diskusi dan debat akademis mengenai kebijakan gender dan kemiskinan, mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mencari solusi yang lebih baik terhadap masalah yang ada dan Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti mendatang, yang diharapkan dapat mengatasi dan melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.